



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 897 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, perlu menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal pada instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
- b. bahwa Kepala Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal telah menyampaikan usulan nama Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal yang dilengkapi dengan spesimen untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa usulan nama Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal dan spesimen sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. meneliti dan memeriksa pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan SKA;
- b. meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA dan SKA Perubahan;

- c. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*);
- d. memberikan persetujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- e. menandatangani Formulir SKA;
- f. melakukan verifikasi terhadap data SKA yang diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktorat;
- g. menyimpan dan memelihara arsip SKA serta dokumen pendukungnya paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA;
- h. melakukan verifikasi terhadap eksportir yang akan memiliki hak akses pada sistem e-SKA;
- i. melakukan verifikasi terhadap eksportir yang akan ditetapkan sebagai eksportir terverifikasi;
- j. mendampingi pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor;
- k. menerbitkan Surat Keterangan Kandungan Nilai Lokal (SKKNL) di wilayah kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KETIGA : Pejabat Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 397 Tahun 2018 tentang Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,



Oke Nurwan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 897 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
1	01.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH	BANDA ACEH	BDA	1. ZULFIKAR 2. SUSILAWATI 3. RIZKY WAHYUDI 4. RAFSANJANI
2	01.09	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	LSM	1. FILGUN 2. ZAINAL ABIDIN 3. ISKANDAR
3	01.10	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	SABANG	DKS	1. SYARJANI 2. HENDRA SETIAWAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
4	01.11	DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH	TAKENGON	TKG	1. SYUKURUDDIN 2. HARMAN TAMARLAN 3. IWAN MARDI HORAS M 4. SARINI MUHAMMAD ALI 5. MUHAR ABDUH WAHAB
5	02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN	1. ALWIN 2. PARLINDUNGAN LUBIS 3. M. IRSAN LUBIS 4. FERY ARIFianto
6	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU CABANG SUMATERA UTARA	MEDAN	TMD	1. NOVIRA DWI SHANTY ARTSIWI 2. ZAINAL
7	02.22	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	SIMALUNGUN	KEK-SM	1. WASIN SINAGA 2. TIGOR MONANG PARULIAN DAMANIK 3. NAOMI SIGALINGGING 4. DEWI SARTIKA SITUMORANG
8	03.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG	PDG	1. ASBEN HENDRI 2. RIDONALD 3. SYAFRIZAL

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
					4. DEFITRA
					5. HASNURITA
9	04.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU	PEKANBARU	PKB	1. YULWIRIATI MOESA
					2. NURFIANTI
					3. HALIMATUSAKDIAH
					4. ZIKRA MELINDA
					5. YULIA SAFITRI
10	04.01	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	SELAT PANJANG	MTI	1. MOHAMAD AZZA FARONI
					2. RUDI
					3. ADE SUHARTIAN
					4. HIDAYAT
					5. TRISDIANDI
11	04.03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	TBL	1. DHOAN DWI ANGGARA
					2. EKA RHANTY WARDANI
					3. SALBIAH
					4. LISA AFRIANTI
12	04.04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP	1. DIAN NUSA
					2. MISWAR
					3. ANASRI.T
					4. SETIA KURNIAWAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
13	04.05	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG	BINTAN	KEK-GB	1. HASFARIZAL HANDRA
					2. ALFENI HAMRI
					3. SY. GUMALA NOVITA
					4. SETIA KURNIAWAN
14	04.14	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DUMAI	KDM	1. ZULKARNAEN
					2. HERMANTO
					3. TUTI HASRIANTI
					4. SLAMAT RIYADI
					5. AMI LAILY
15	04.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	BATAM	KBM	1. GUSTIAN RIAU
					2. SRI MIRANTHY ADISTHY
					3. LENY NURISKAWATY
					4. YULISMAR
					5. RAHARDI
16	21.02	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	KARIMUN	KRM	1. CENDRA
					2. MOHAMMAD IQBAL
					3. HAZNU ZAMSYAH
17	04.16	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	BATAM	BTM	1. TRI NOVIANTA PUTRA
					2. BARLIAN UNTORO
					3. RUSTIKOWATI
					4. HERMANTO

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
18	05.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	JAMBI	JMB	1. ARIANSYAH 2. SUBYANTO 3. FATIMAH
19	06.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB	1. AGUS YUDIANTORO 2. ACHMAD MIRZA 3. CHALID 4. FAROHMA
20	07.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	BENGKULU	BKL	1. LIERWAN 2. NOPTI SURYADI 3. RIA AYU WIDYASARI
21	08.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL	1. SATRIA ALAM 2. YUSLI REVONADI 3. TEGUH WINARNO 5. JUWITA PRIMA
22	31.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	PPG	1. MASHUN 2. ROSY HANDAYANI 3. DESY DETRIANA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
23	31.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TPP	1. AZHAR
					2. JONTIAR HUTAPEA
					3. SYAFIK GANI
					4. NOVITA KESUMAWATI
					5. IRWANSYAH
24	30.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG	SERANG	SER	1. ABDUL WAHID
					2. ARIES ANWAR MALINTANG
					3. CICIN RODIYAH
					4. ABDUL MUTI
25	30.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR	1. DWI EKA APRILLIA PUTRI
					2. SYARIFUDIN
					3. JUNAEDI
					4. AKHMAD TITO GIARTHO
26	30.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG	1. AGUS SUGIONO
					2. JUNIJAR
					3. OKE SULENDRO SETYO RACHMAN

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
27	30.06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON	CILEGON	KCG	1. TUBAGUS DIKRIE MAULAWARDHANA
					2. EMA HERMAWATI
					3. VITA FERONITA
28	09.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT	1. ADI ARIANTARA
					2. JHONSON M. SIREGAR
					3. YANTO SIREGAR
					4. BADIA RAJA H. SIREGAR
					5. MARYANAH
29	09.01	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS	1. SHITA DAMAYANTI
					2. RIANA LIESDAWATY
					3. SISCA MAYA KADANG
					4. DODDY CRISNAJANDI
					5. RONDANG TIARLINA
30	09.02	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM	1. R IGAN MUHAMMAD FAISAL
					2. OBERLIN HUTAPEA
					3. PARTINI
					4. NEFI ANTO DALISWANTORO

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
31	09.03	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP	1. BANGUN RICHARD
					2. HERMI ANDRIANI
					3. ELMIWATI
					4. JENAL ARIFIN
32	09.04	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB	1. HJ. NUR'AINI SILVIANA. D
					2. IKA ADHIS RBM
					3. EEN HERAWATI
					4. RENNIE PUSPITASARI
33	09.05	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU	1. H. ARFIAN
					2. DARMADI
					3. ACHMAD HUSEIN PELU
					4. MURTI RAHAYU
					5. HANA SUHANA A. NUGRAHA
34	09.06	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN CAKUNG	CAKUNG	KBN-CK	1. H.M. SATTAR TABA
					2. WIRDIYONO
					3. POPPY PURBASARY
					4. AAN ANSORI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
35	09.08	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN MARUNDA	MARUNDA	KBN-MR	1. H.M. SATTAR TABA
					2. DASEP TITOF
					3. SUGENG BAGYO
					4. HARDO DEDALI
36	10.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG	BDG	1. HENING WIDIATMOKO
					2. IDA ROHAYAH
					3. IRA RAHMAYANTI
					4. DELIMA SITORUS
					5. NENDEN ROFAIDA
37	10.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN	1. JONA SIJABAT
					2. YUNI SUROWATI
					3. HESTY DHARMANITA
					4. RONNY IMRON
38	10.02	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	SKB	1. H. ARDIANA TRISNAWIANA
					2. ELA NURLAELA
					3. VICTOR DOLLAR PARDOMUAN
					4. TUTIK HERYANTI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
44	10.16	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI	1. MULYADI
					2. AGUS BURHAN AHMAD FARIZ
					3. YULIATI
					4. SITI KHOTIJAH
45	10.18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KSM	1. AYEP SUPRIATNA
					2. ASEP SAEFULLAH
					3. LINDRI PRAGIWATI
					4. UMIYATI ADISTI
46	10.19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD	1. ELLY WASLIAH
					2. IIM DEWI MULYANI
					3. INDAH KURNIAWATI
					4. MUAMMAR KHADDAFI F B
					5. MUHAMMAD QADAFI
47	10.20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CIREBON	CIREBON	KCR	1. YATI ROHAYATI
					2. ATENG ROJUDIN
					3. MUHAMMAD ARID
48	10.21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI	BEKASI	KBS	1. MAKBULLAH
					2. CHAERUL ANWAR
					3. HAMBALI
					4. AGUS PURWANTO
					5. RUSIAH

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
49	1 1.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR	1. M. ARIF SAMBODO 2. HARYANTA 3. TEGUN PRIHADI 4. HENI SUSILO WARDANI 5. HIMAWAN PUJI NUGROHO
50	1 1.01	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP	CILACAP	CLP	1. UMAR SAID 2. BACHTIAR ACHMAD 3. SUWARSO 4. BUANG SURIPTO
51	1 1.31	DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR	1. SUBAGIYO 2. SUPRAPTO 3. BUDIAJI KRISTIANAWATI 4. ENDANG KURNIA MAHARANI
52	1 1.36	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG – LEMBAGA TEMBAKAU SURAKARTA	SURAKARTA	TSL	1. EKO PARTONO 2. SENEN 3. HARYADI JOKO PURWANTO
53	12.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	YOGYAKARTA	YGA	1. ARIS RIYANTA 2. YUNA PANCAWATI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
		PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			3. THERESIA SUMARTINI 4. GUNTUR WAHYU ANGGORO 5. WIDYA ANDRIYANI
54	13.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY	1. DRAJAT IRAWAN 2. DESAK NYOMAN SIKSIAWATI 3. ABDIEL POPANG KABANGA 4. NINIK MARGIRINI 5. NURING RETNOWATI
55	13.10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	BNW	1. SUMINTEN 2. GELLA RUSMANINGRUM 3. BUDI UTOMO 1. MARIA ULFA
56	13.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	PSR	2. DEMES LESTARI 3. SISWANTO 1. AGUS BUDIONO 2. MINHAD 3. SUNIK 4. RIKE ROOSWITA
57	13.25	DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	GRESIK	GRS	

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
58	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER	JEMBER	TJB	1. SITI ANDRIATI WIDARTIEN 2. BUDI NUGRAHENI 3. KUKUK TRI WAHYUNINGTYAS 4. SANDRA MAHARANI
59	13.39	UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA	SURABAYA	TSB	1. DESAK NYOMAN SIKSIAWATI 2. ICHSANUDIN MA'DJID 3. DWI ARI RETNANI 4. PARAMITA LAKSMI WARDHANI 5. BAMBANG RIYADIANTO
60	14.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA	1. MUHAMMAD RIDWAN 2. EKO DARMAWANSYAH
61	15.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KPY	1. ASTER BONAWATY M 2. ADI SOESENSO 3. PRAMUDYA ERLANGGA 4. EVELINA DIAN MAYASARI 5. TRIWINBERT YOHANSEN EMBANG
62	15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	PKN	1. MUHAMMAD YADI 2. TRIDOSO EKO LUSINO 3. MUHAMMAD AGUSTA WIJAYA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
63	15.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	SPT	1. RIHARD SIREGAR
					2. DINA MARIA KRISSETIA SINAMORA
64	15.03	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KKP	1. SUPARMAN
					2. ANITA SUMARNI MULDHANI
					3. RAHAYU TRIS GIPIYANTO
					4. RUSNANINGSIH
65	16.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD	1. FUAD ASADDIN
					2. HENI PURWANINGSIH
					3. ALI WARDANA
66	16.03	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU	TANJUNG REDEP	TJR	1. WIYATI
					2. TAMIN
					3. JOKO MARIONO
					4. JULKIPLI
					5. NORALITA
67	16.09	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG	BONTANG	KBG	1. ASDAR IBRAHIM
					2. HERIANSYAH
					3. AHMAD YADI
					4. MULYONO

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
68	16.10	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KBL	1. PILIPUS RIMPA
					2. DEWI SARTIKA
69	16.12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR	1. TAJUDDIN
					2. M. ROMLI
					3. M. MISRAN
					4. IHDIANUR
70	16.13	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NNK	1. JABBAR
					2. HERRY AGENG SANTOSO
					3. BAYU WAHYU WIJAYA
					4. SITTI ARAFAH
					5. MASBUDI
71	17.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM	1. BIRHASANI
					2. RIAHARTI ZULFAHANI
					3. HELAUNIATY
72	17.01	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KBR	1. MAHYUDIANSYAH
					2. M. JAHRI
					3. SRI ASIH HANDAYANI
					4. ARBAINAH
					5. SYARIFAH FATIMAH

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
73	18.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI	DENPASAR	DPS	1. DEWA PUTU MANTERA 2. DESAK NYOMAN MARHAENI PUTRI 3. LUH HETY VIRONIKA 4. ANAK AGUNG NGURAH BAGAWINATA 5. I GUSTI NYOMAN GDE SATRYA WIBAWA
74	18.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	GIR	1. WAYAN SUAMBA 2. HENI SRIWAHU 3. ANAK AGUNG GDE WISNU 1. BAIQ DENNY EVITA DARMIYANA 2. RACHMAT WIRA PUTRA 3. LALU UMAR SYARIF 4. ISKANDAR
75	19.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR	1. M. NASIR ABDULLAH 2. KIRENIUS TALO 3. SRI WAHYUNI 4. MUHAMMAD A. BUCHARI
76	33.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KPG	

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
77	21.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS	1. I DEWA NYOMAN MAHENDRAJAYA 2. MUNARTI 3. ERNAWATI
78	22.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	PALU	PLU	1. MOH. ARIF LATJUBA 2. IDA NURSANTI 3. MURSID KAYO 4. LINDA 5. SAKINAH
79	22.01	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGGAI	LUWUK	BGI	1. HASRIN KARIM 2. SRIHANDAYANTI MAADJI 3. APRIANI OGOTAN 4. SURTIKANTI DJAMALI 5. LINTJE ESTERLINA RUPIDARA
80	22.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU	PALU	KEK-PL	1. DENNY TAUFAN 2. SYAHRIAH LANTAH 3. ARDIANSYAH
81	34.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	MAMUJU	MJU	1. AMIR MARICAR 2. NURDIANA BADU 3. MUH NAJIB ALI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
82	32.00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	GORONTALO	GTL	1. M. NADJAMUDIN
					2. HENRY A ABAY
					3. ZAKIYA MOHAMMAD BASEREWAN
83	23.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	MND	1. JENNY KAROUW
					2. DARWIN MUKSIN
					3. JEMMY J. PANDEY
84	23.05	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	BITUNG	KBU	1. K.W. BENNY LONTOH
					2. HENGKY M. SUMLANG
					3. MEIDY P. MOHEDE
					4. OCTAVIANUS T.B. SANDA
85	24.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR	1. SITI SALEHA
					2. SAPOAN
					3. MUHAMMAD YASSER TUWU
					4. HASNAWATI
86	25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU	AMBON	ABN	1. ELVIS PATTISELANNO
					2. SYARIF HIDAYAT
					3. NY. WIESYE TAHAMATA
					4. JAN HAURISSA

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
87	26.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	TERNATE	TNT	1. ASRUL GAILEA
					2. SURYANTI ARSAN
					3. SALEH SAPSUHA
88	26.09	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI	MOROTAI	KEK-MT	1. USMAN TAE
					2. CHAIRUL HADAD
89	27.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA	JAYAPURA	JYP	1. MARKUS M.E. OLUA
					2. HERMAN BLESKADIT
					3. ROSALINA DEFRETES
					4. EKO IRIANTO LAKSONO
					5. FERDINANDA I. SIHOTANG
90	27.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERAUKE	MERAUKE	MRE	1. BUDIYANTO
					2. NURSYAM
91	28.02	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	SRI	1. EDI NOCA MUDUMI
					2. AGUSTINUS YAN
					3. JAVED O. SIPAHELUT
92	29.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR	1. R. MARPAUNG
					2. FRETS M.O.HOWAY
					3. KUSWATI

NO	NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH	NAMA PEJABAT
93	29.02	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	MNR	1. Ir. ROSITA WATOFA
					2. FRENGKI SAIBA, S.Sos
					3. YOHANANTHON WANMA, S.IP
94	29.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA	TIMIKA	MMA	1. BERNADINUS SONGBES
					2. LIBERT YAN MANGGARA
					3. SRI YULIANA BOROH
					4. FREDKUS ADII

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,


OKE NURWAN